



**DIREKTORAT INFORMASI DAN MEDIA**

**PRESS CABLE**

**NOMOR : 229/10122008**  
**HARI : SENIN**  
**TANGGAL : 10 DESEMBER 2008**

**DAFTAR ISI**

		<b>Halaman</b>
<b>I.</b>	<b>INTERNASIONAL</b>	
	Australia siapkan dana siaga US\$1 miliar bagi RI	3
	Dutch minister : muslim countries must prevent anti-Dutch violence	3
	Pinjaman ASEAN+3 Dinego	3
	40 Juta Orang Lagi Alami Kelaparan Akut	4
	RI-Australia Sepakat Terapkan Perjanjian Lombok	5
<b>II.</b>	<b>NASIONAL</b>	
	<b>A. POLITIK</b>	
	KINERJA PARLEMEN Agung: Kunjungan ke Luar Negeri Harus Dikurangi	6
	Porn law casts a shadow over human rights	7
	<b>B. EKONOMI</b>	
	Bank Dunia Setujui Pinjaman US\$950 Juta untuk Indonesia	8
	BI Perkirakan Ekonomi 2008 Tumbuh 6,1%	8
	Budaya Potensial Sumbang Devisa	9
	<b>C. SOSBUD</b>	
	Budaya Potensial Sumbang Devisa	9
	PERANTI LUNAK Pengurusan Piagam HKI Terus Meningkat	10

	<b>D.</b>	<b>HANKAM</b>	
		Konga XXIII B/UNIFIL Resmi Dibubarkan	<b>10</b>
	<b>E.</b>	<b>HUKUM</b>	
		RI-Australia Barter Buron, Adrian Ditukar Hadi Asmadi	<b>11</b>
	<b>F.</b>	<b>OLAHRAGA</b>	<b>--</b>
	<b>G.</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	
		Busway dan Bantar Gebang Untuk Perdagangan Karbon	<b>11</b>
	<b>III.</b>	<b>ARTIKEL</b>	
		ASEAN human rights body: Will it have an impact on Myanmar's junta? (by Djoko Susilo)	<b>12</b>
	<b>IV.</b>	<b>LAIN-LAIN</b>	<b>--</b>
	<b>V.</b>	<b>EDITORIAL</b>	
		Hari Antikorupsi Sedunia	<b>13</b>
		Human rights abuser	<b>14</b>

Jakarta, 10 Desember 2008  
Sub Direktorat Berita  
Direktorat Informasi dan Media

## I. INTERNASIONAL :

### 1. Australia siapkan dana siaga US\$1 miliar bagi RI

Pemerintah Federal Australia menyiapkan dana sebesar US\$1 miliar dalam bentuk pinjaman siaga (standby loan) bagi pemerintah RI yang bisa dicairkan sewaktu-waktu jika ekonomi Indonesia memburuk akibat krisis ekonomi global.

Perdana Menteri Australia Kevin Rudd mengatakan penyediaan dana bantuan tersebut merupakan bagian dari kerja sama Australia dan Indonesia sebagai negara bertetangga dan sahabat. Saat terjadi krisis ekonomi satu dekade lalu Australia juga menyediakan dana bantuan bagi Indonesia.

"Kami adalah salah satu dari negara yang menyiapkan standby loan untuk Indonesia, di samping Jepang, Uni Eropa, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia," ujarnya ketika menyampaikan konferensi pers gabungan bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di acara Bali Democracy Forum, hari ini.

RI sebelumnya telah mendapatkan pinjaman siaga US\$2 miliar dari Bank Dunia ketika pertemuan tahunan IMF-World Bank digelar di Washington DC, beberapa waktu lalu. Bank Dunia juga telah memberikan komitmennya untuk memfasilitasi tambahan dana standby loan hingga secara keseluruhan mencapai US\$5 miliar lebih yang berasal dari sejumlah sumber lain.

Presiden Yudhoyono mengatakan saat ini pemerintah RI telah memutuskan untuk mengubah strategi dalam menghadapi krisis dengan cara menghindari pembiayaan dari IMF dan mengembangkan kerja sama berbeda dengan menggandeng Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, serta negara sahabat seperti Jepang, Australia, dan Uni Eropa.

Yudhoyono mengakui dalam situasi krisis seperti saat ini banyak negara yang memerlukan bantuan keuangan dalam berbagai bentuk termasuk standby loan, tak terkecuali Indonesia.

Presiden juga menyampaikan dana standby loan yang disiapkan Australia merupakan bagian dari pinjaman siaga yang diraih RI dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan negara sahabat.

Menurut Rudd, pada Februari tahun depan pemerintah Australia akan menjadi tuan rumah dalam konferensi yang membahas masa depan hubungan bilateral RI-Australia di Sydney. Sebanyak 120 pejabat kedua negara dari berbagai kalangan akan menghadiri pertemuan tersebut.

Konferensi tersebut akan difokuskan untuk membahas upaya penguatan institusi demokrasi, menjaga pertumbuhan ekonomi, dan kerja sama penanganan masalah lingkungan hidup. Terkait dengan Bali Democracy Forum, Australia juga menyediakan dana bantuan sebesar US\$3 juta untuk pengembangan Institute for Peace and Democracy. (Bisnis Indonesia)

### 2. Dutch minister : muslim countries must prevent anti-Dutch violence

Dutch Foreign Minister Maxime Verhagen on Tuesday called upon Muslim countries on to make sure the film *An Interview with Mohammed*, by Iranian-born Ehsan Jami, will not result in violence against Dutch nationals or Dutch companies.

Verhagen said he discussed the matter on Tuesday with ambassadors of Muslim countries in The Hague. The foreign minister says he fears Muslim extremist groups might use the film as an excuse to commit violence against Dutch targets.

Governments in Muslim countries have the responsibility to prevent this, Verhagen said.

In the film, released earlier on Tuesday, Ehsan Jami, 23, a city council member for his one-man-party in Leidschendam-Voorburg near The Hague, is depicted as conducting an interview with the prophet Mohammed, played by an actor who remains unrecognizable.

In the film, Mohammed conveys the message to the Muslim world that Islam should be interpreted in its historical context and that it is wrong to copy ideas directly from the Koran. (ANTARA)

### **3. Pinjaman ASEAN+3 Dinego**

Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) masih menegosiasikan penarikan pinjaman dari bank-bank sentral ASEAN+3.

Jika berhasil, pemerintah bisa memperoleh dana sebesar USD12 miliar melalui fasilitas hasil inisiatif Chiang Mai tersebut. Ketua Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FSSK) Raden Pardede mengatakan, pemerintah menginginkan agar penarikan pinjaman tidak mengacu pada persyaratan Dana Moneter Internasional (IMF).

Menurutnya, sesuai ketentuan ASEAN+3, bila suatu negara menginginkan penarikan pinjaman di atas 20% dari total dana yang dimilikinya, dipersyaratkan mereka mengikuti aturan IMF. Namun, kata Raden, pemerintah tidak ingin mengikuti persyaratan tersebut karena Indonesia sudah menarik diri dari pengawasan IMF.

"Ini yang pemerintah dan Bank Indonesia terus negosiasikan," ujarnya sesuai seminar dampak krisis finansial di Gedung Bappenas Jakarta kemarin. Terlebih, kata dia, IMF telah menawarkan kepada Indonesia untuk menarik pinjaman langsung tanpa persyaratan. Bahkan, nilai pinjaman yang ditawarkan IMF mencapai USD15 miliar atau lebih tinggi USD3 miliar dari ASEAN+3.

"IMF menyatakan kepada kita bahwa mereka bisa memberikan USD15 miliar tanpa persyaratan, tapi kita tidak ambil itu. Kita ambil dari yang lain dulu, itu yang saya katakan ASEAN +3 tadi," kata Raden. Raden menuturkan, untuk memperkuat lobi pemerintah dan BI terkait negosiasi itu, pemerintah telah mengajukan penawaran pelaksanaan perundingan ASEAN+3 pada 15 Desember mendatang supaya dapat dilaksanakan di Jakarta.

Raden menambahkan, penarikan pinjaman ini akan dapat memberikan fasilitas tambahan likuiditas terhadap cadangan devisa nasional akibat arus modal keluar dana-dana asing. "Jadi kalau ada capital outflow, bisa digantikan dengan itu. Dengan buffer seperti itu kita harapkan kepercayaan terhadap pasar keuangan kita akan tetap kuat," ujarnya.

Seperti diketahui, bank-bank sentral anggota ASEAN +3 baru-baru ini menyepakati untuk mengumpulkan cadangan devisa senilai USD80 miliar di bawah kerangka Inisiatif Chiang Mai yang dapat ditarik oleh setiap anggota bila terjadi krisis dalam neraca pembayarannya.

Sebanyak 80% dana tersebut akan disumbangkan China, Jepang, dan Korsel, sedangkan sisanya yang 20% merupakan kontribusi dari negara-negara anggota ASEAN. Penarikan dana nantinya melalui skema pertukaran (swap) mata uang.

Berdasarkan kesepakatan, penarikan dana sebesar lebih dari 10% dari total cadangan devisa mematok persyaratan berupa persyaratan pinjaman dan pengawasan dari Dana Moneter Internasional (IMF). Sementara itu, menurut catatan Bank Indonesia, posisi cadangan devisa nasional per November 2008 mencapai USD50,2 miliar, turun sebesar USD380 juta dibandingkan posisi cadangan devisa Oktober sebesar USD50,58 miliar.

Dalam beberapa bulan terakhir, posisi cadangan devisa telah mengalami penurunan dengan akumulasi sebesar USD10 miliar dari posisi tertingginya USD60 miliar. Di tempat yang sama, Senior Resident Representative IMF untuk Indonesia Milan Zavadzil mengungkapkan, per Oktober pihaknya telah melakukan berbagai kesepakatan dengan beberapa negara untuk mengucurkan pinjaman pendanaannya. Menurutnya, IMF siap mengalokasikan dana pinjaman bagi negara-negara yang membutuhkan dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan pinjaman serupa tahun 1998 lalu. (Koran Sindo)

### **4. 40 Juta Orang Lagi Alami Kelaparan Akut**

Target mengurangi setengah dari jumlah penduduk dunia yang kelaparan pada tahun 2015 bakal sulit dicapai. Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO, Selasa (9/12), menegaskan,

target ini sulit karena pada tahun ini saja lebih dari 40 juta penduduk dunia bakal mengalami kelaparan akut.

"Pada banyak negara, target dunia mengurangi setengah penduduk dunia yang kelaparan menjadi suatu yang sulit untuk direalisasi," ujar Direktur Jenderal FAO Jacques Diouf dalam jumpa pers di Roma. Target mengurangi setengah dari penduduk dunia yang kelaparan ini merupakan satu dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals) yang ditetapkan tahun 2000.

"Ini kenyataan sedih yang tidak bisa diterima pada fajar abad ke-21," ujar Diouf. "Bahkan, sasaran pengurangan setengah dari penduduk yang kelaparan pada tahun 2015 tidak bisa diterima secara moral," tambahnya.

#### **Krisis pangan global**

Krisis pangan global telah menambah lebih dari 40 juta orang masuk dalam level kelaparan pada tahun ini. Dengan demikian, total penduduk dunia yang kelaparan menjadi 963 juta orang dari sekitar 6,5 miliar penduduk dunia saat ini.

Diouf yang meluncurkan laporan tahunan soal kerawanan pangan dunia menyebutkan, krisis pangan terutama dialami keluarga miskin, mereka yang tak punya lahan, perempuan kepala rumah tangga. Dalam laporan "State of Foods Insecurity in World 2008", Diouf menyerukan negara-negara kaya agar menginvestasikan 30 miliar dollar AS per tahun dalam pertanian. Disebutkan, angka ini hanya sekitar 8 persen dari subsidi pertanian yang dikeluarkan negara maju.

"Sebanyak 30 miliar dollar AS tidak ada apa-apanya dibandingkan subsidi dan dukungan dari negara-negara OECD, tidak ada artinya dibandingkan miliaran dollar AS yang dibelanjakan semua negara sedang membangun guna mengatasi krisis keuangan yang sedang berlangsung," ujarnya. OECD (Organisasi bagi Pembangunan dan Kerja Sama Ekonomi) beranggotakan 24 negara maju.

"Permintaan (30 miliar dollar AS) ini tidak banyak," ujarnya. "Kita tidak mengatakan bahwa petani di negara maju tidak perlu didukung," ungkapnya. "Namun, mereka akan didukung dengan cara jangan merusak pasar yang berdampak negatif pada kapasitas petani di negara-negara sedang membangun," ujar Diouf. Sebab, di negara berkembang tadi ada 923 juta orang yang punya hak untuk mendapat makanan. Ini harus menjadi prioritas.

Diouf mengakui, dia sudah meminta Presiden AS terpilih Barack Obama untuk memimpin tujuan "mengenyahkan kelaparan dari muka bumi" dengan memulai pertemuan puncak tahun depan. Pertemuan untuk mendapat cara dan upaya memobilisasi dana 30 miliar dollar AS setiap tahun.

"Kami mempelajari sepanjang tahun lalu bahwa keamanan pangan juga merupakan masalah perdamaian dan keamanan di seluruh dunia," ujar Diouf. "Kami sudah mengamati kondisi di 20 negara di seluruh dunia yang mengalami kerusuhan karena kelaparan," tambahnya.

Dijelaskan, sekitar 907 juta orang dari 963 juta orang di seluruh dunia yang mengalami kelaparan ini tinggal di negara-negara sedang membangun. Dan, sekitar 65 persen dari angka mereka yang kelaparan tadi berada di tujuh negara, yaitu Indonesia, China, India, Republik Demokratik Kongo, Banglades, Pakistan, dan Etiopia. FAO tidak merinci berapa banyak dari mereka yang mengalami kelaparan akut ini berada di Indonesia. (Kompas)

#### **5. RI-Australia Sepakat Terapkan Perjanjian Lombok**

Pemerintah Indonesia dan Australia sepakat untuk menerapkan Perjanjian Lombok (*Lombok Treaty*) guna memperkuat kerjasama dwipihak dalam memberantas penyelundupan manusia.

"Indonesia dan Australia sepakat meningkatkan kerjasama dwipihak di bidang pemberantasan penyelundupan manusia dengan memperkuat penerapan Perjanjian Lombok di tingkat lapangan," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Nusa Dua, Bali, Rabu (10/12) pagi, se usai pertemuan dwipihak dengan PM Australia Kevin Rudd.

Menurut Presiden Yudhoyono, hal itu akan mengintensifkan kerjasama dwipihak di lapangan sehingga kedua belah pihak dapat melakukan aksi cepat untuk mengatasi penyelundupan manusia di perbatasan kedua negara. Presiden juga mengatakan bahwa DPR RI sedang dalam tahap akhir meratifikasi Konvensi PBB tentang Kejahatan Lintas Batas yang diantaranya membahas tentang perdagangan manusia dan penyelundupan manusia. "Apabila Indonesia telah meratifikasi Konvensi itu maka dua negara memiliki landasan yang kokoh untuk mempromosikan kerjasama dalam memberantas penyelundupan manusia," katanya.

Kepala Negara berharap sejumlah kasus penyelundupan manusia di perbatasan kedua negara tidak mengganggu hubungan baik kedua negara yang telah terjalin lama dan justru dapat memperkuat hubungan itu. Pemerintah Indonesia juga akan mengekstradisi seseorang yang terlibat penyelundupan manusia bernama Hadi Achmadi.

Sementara itu Rudd mengatakan bahwa pemerintah Australia menyambut baik upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencegah penyelundupan manusia, termasuk proses ratifikasi Konvensi PBB tersebut. Ia berharap kedua negara dapat lebih memperkuat kerjasama di perbatasan kedua negara untuk mencegah kejahatan-kejahatan lintas batas.

Rudd menilai penyelundupan manusia adalah salah satu kejahatan nyata yang harus dihadapi kedua bangsa sehingga diperlukan komitmen kedua negara untuk mengatasi hal itu. Ia juga mengatakan bahwa Indonesia dan Australia bukanlah satu-satunya negara di dunia yang mengalami masalah tersebut sehingga kerjasama antar negara sangat dibutuhkan untuk mencegah aksi tersebut berlanjut.

Sebelumnya Juru bicara Departemen Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan bahwa pemerintah Indonesia sedang menyelidiki laporan mengenai dugaan diplomat Indonesia yang bertugas di Afghanistan melakukan penjualan visa yang memungkinkan sejumlah orang masuk ke Australia secara tidak sah.

Sementara itu *The Australian* mengutip seorang warga Afghanistan di Australia yang melaporkan bahwa visa tersebut masing-masing dijual seharga 1.500 dolar AS.

Kepolisian Indonesia dilaporkan bekerjasama dengan kepolisian Australia telah menahan dua orang pemain senior dalam kejahatan penyelundupan manusia dari Indonesia ke Australia yaitu seorang warga Pakistan bernama Sakih dan seorang warga Indonesia bernama Khairudin. Pihak berwenang Australia mengatakan bahwa mereka telah menengarai adanya enam kapal penyelundup sejak September di pantai barat negeri itu. (Media Indonesia)

| | | .

## **NASIONAL :**

### **A. POLITIK :**

#### **1. KINERJA PARLEMEN Agung: Kunjungan ke Luar Negeri Harus Dikurangi**

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat HR Agung Laksono mengimbau para anggota DPR berhemat. Pasalnya, anggaran dan tunjangan DPR pada tahun 2009 dipastikan tidak akan mengalami kenaikan.

"Tidak akan ada kenaikan anggaran dan tunjangan bagi anggota legislatif tahun depan. Selain itu, dana untuk kunjungan kerja ke luar negeri juga sudah dikurangi," kata Agung Laksono kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (9/12).

Soal kenaikan anggaran kunjungan kerja dari Rp 53 miliar tahun 2007 menjadi Rp 113 miliar, Agung Laksono menjelaskan, tunjangan kepada para anggota legislatif itu tidak berubah sejak tahun 2006. Kendati demikian, perubahan nilai yang ada lebih disebabkan karena adanya perubahan nilai mata uang rupiah atau kurs.

"Kenaikan tidak ada, tapi kalau (kenaikan akibat) kurs itu bukan kewenangan DPR," ujarnya.

Karena itu, Agung Laksono sekali lagi mengimbau semua anggota legislatif untuk dapat mengurangi pemakaian anggaran. Terutama untuk mengurangi anggaran kunjungan ke luar negeri. "Para anggota Dewan sebaiknya mengurangi kunjungannya," ujarnya.

Agung Laksono mengatakan, meski pemilu untuk anggota legislatif dilakukan pada 9 April 2009, tetapi masa bakti anggota DPR periode 2004-2009 baru akan berakhir 1 Oktober 2009. "Dengan demikian tinggal beberapa bulan lagi," katanya.

Seperti diketahui, anggaran Dewan Perwakilan Rakyat sudah dipotong sebesar Rp 180 miliar dari Rp 1,8 triliun dalam APBN perubahan 2008. Pemotongan anggaran ini diprioritaskan pada pengurangan kunjungan kerja DPR ke luar negeri.

#### **Agenda Pemilu**

Di tempat terpisah, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Arif Nur Alam mengingatkan anggota DPR, DPD, dan MPR agar tidak menghambur-hamburkan anggaran negara, apalagi dunia kini tengah mengalami resesi ekonomi. Ia juga mengingatkan, anggota DPR, DPD, dan MPR jangan menyalahgunakan dana anggaran untuk kepentingan Pemilu 2009.

"Anggota parlemen harus melakukan evaluasi mendasar terhadap penggunaan anggaran, kegiatan, akuntabilitas kinerja tahun lalu, dan disampaikan ke publik. Apalagi, mengingat DPR disibukkan dengan agenda pemilu yang semakin dekat," ujar Arif.

Fitra juga mendesak pimpinan DPR sebagai penanggung jawab keuangan agar konsisten dengan janjinya untuk menghemat anggaran.

Ia juga menyambut baik adanya keinginan pimpinan DPR untuk menghentikan kunjungan kerja ke luar negeri yang berpotensi menimbulkan pemborosan dan tidak substantif dalam memperkuat fungsi DPR.

Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Arbi Sanit, berpendapat, kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2004-2009 belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Ini bisa dilihat dari banyaknya undang-undang produk DPR yang tidak berpihak kepada rakyat.

"Belum ada perbaikan, terlebih tahun depan banyak anggota DPR berkonsentrasi untuk menghadapi Pemilu 2009," katanya. DPR juga diminta menghentikan berbagai acara seremonial dan kegiatan yang tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat. (Suara Karya)

## **2. Porn law casts a shadow over human rights**

The newly enacted anti-pornography law threatens to further stain Indonesia's already sullied human rights record, rights groups warn, as Bali prepares to spearhead national opposition to the law.

Activists have expressed deep disappointment in President Susilo Bambang Yudhoyono, who signed the much-criticized bill into law days before the celebration of World Human Rights Day, which falls every Dec. 10.

Ildal Kassim, chairman of the National Commission for Human Rights (Komnas HAM), said the law, which would invade people's privacy, could trigger human rights violations.

"It threatens the existence of minority groups such as homosexuals and transsexuals. It will further increase human rights violations in the future," he told The Jakarta Post on Tuesday.

"The law will also create disharmony among the people. It will only spark suspicion among them."

The Institute for Policy Research and Advocacy (Elsam) also raised concerns over possible rights violations increases stemming from the anti-pornography law.

"Some articles are not for the protection of human rights. There are loopholes that could be misinterpreted," said Surpiyadi Widodo Eddyono, Elsam legal services coordinator.

He encouraged activists to propose a judicial review of the law by the Constitutional Court.

"Now is the right time for a judicial review, because the law has just been enacted by the President," he said.

Local authorities and organizations in Bali expressed shock and dismay that Yudhoyono had enacted the law without considering stiff protests from groups across the country.

Bali Governor I Made Mangku Pastika earlier said his province would not adopt the law because it was not in line with Bali's philosophical and social values.

Ngurah Harta, coordinator of the Bali People's Component (KRB), said he would meet with other KRB members to discuss prompt legal action to have the law reviewed by the Constitutional Court.

"I really regret the President's decision, because he did not accommodate the minority's aspirations. We will try hard to finish the draft of our request for a judicial review. We hope the draft will be ready to be filed this week," he said.

The KRB's petition has received the Bali Legislative Council's full endorsement.

Deputy council speaker I Gusti Ketut Adhiputra said the council would join the KRB in filing for a judicial review.

"Our stance is clear. Bali won't be able to adopt the porn law because it restricts our cultural and religious lives," he said.

Harta added if the judicial review did not work, the KRB would request the island become an autonomous province, in protest at the anti-pornography law.

"And if both options fail, we will encourage the people of Bali to unite in civil disobedience by not implementing the law here and not paying taxes. Our tax revenues have been spent on such an asinine law, so why should we pay?" he said.

Bali Sruti, an NGO dealing with women's issues on the island, also called Yudhoyono's move regrettable.

"We will endorse the realization of the judicial review of the porn law because the latter will clearly victimize women," said activist Luh Putu Anggraeni. (The Jakarta Post)

## **B. EKONOMI**

:

### **1. Bank Dunia Setujui Pinjaman US\$950 Juta untuk Indonesia**

Bank Dunia menyetujui dua pinjaman kebijakan pembangunan senilai 950 juta dolar AS untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia.

"Melalui pinjaman ini, Bank Dunia mendukung upaya Indonesia meningkatkan investasi di sektor infrastruktur, terutama penyediaan layanan listrik, air dan sanitasi, pengembangan kemitraan publik," kata Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, Joachim von Amsberg, di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, Indonesia memiliki posisi yang kuat dalam mengatasi tantangan akibat gejala keuangan dunia. Untuk itu, dana pinjaman dari Bank Dunia ini diharapkan dapat membantu Indonesia, terutama bagi memperkuat kinerja perekonomian dalam menghadapi dampak krisis keuangan di tahun mendatang.

Namun demikian, menurut dia, untuk mengantisipasi krisis yang terjadi, Indonesia diharapkan tetap memegang prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan ekonomi makro akibat masih tingginya ketidakpastian global.

Ia mengharapkan pinjaman tersebut dapat membantu meningkatkan belanja modal departemen-departemen infrastruktur sebesar 25 persen dan meningkatkan porsi subsidi listrik untuk masyarakat berpendapatan rendah.

Selain itu membantu mempersiapkan tender yang kompetitif dan transparan untuk transaksi kemitraan publik-swasta serta secara signifikan mengurangi prevalensi pembuangan sampah pasar terbuka di kota besar dan kecil.

Kepala Ekonom Bank Dunia Indonesia itu mengatakan, utang senilai 950 juta dolar AS dengan waktu pengembalian 24,5 tahun, tenggang waktu sembilan tahun serta bunga LIBOR plus 0,3 persen ini diharapkan mampu mendukung program pemerintah dalam memberikan stimulus untuk perekonomian.

"Dengan tambahan 950 juta dolar yang bisa langsung ditempatkan ke Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah dapat menggunakannya untuk menggerakkan perekonomian, dengan menyalurkannya untuk tujuan investasi," katanya.

Menurut dia, pemerintah akan mempercepat penyaluran belanjanya untuk mendukung stimulus. "Pada semester satu pemerintah tampaknya siap untuk meluncurkan belanjanya guna menopang perekonomian dan mengantisipasi dampak krisis keuangan yang semakin kuat di semester pertama 2009," katanya.

Sementara itu, menurut dia, tambahan 950 juta dolar AS tersebut setidaknya bisa menambah cadangan devisa, meskipun tak memiliki dampak yang signifikan terhadap rupiah.

"Saya kira dampaknya kecil sekali, tapi untuk tambahan likuiditas dan cadangan devisa ya, meski kecil," ujarnya. (ANTARA)

### **2. BI Perkiraan Ekonomi 2008 Tumbuh 6,1%**

Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono mengatakan, pihaknya optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini akan mencapai 6,1% meskipun pertumbuhan ekonomi dunia sedang melambat. "Untuk keseluruhan 2008, perekonomian Indonesia diperkirakan masih tumbuh 6,1%," katanya di Gedung DPR Jakarta kemarin. Kendati demikian, dia mengakui perlambatan ekonomi dunia tetap akan memengaruhi kondisi perekonomian nasional, terutama akibat menurunnya pertumbuhan ekspor, investasi, dan konsumsi masyarakat. Sementara di sisi inflasi, Boediono mengatakan tekanan semakin longgar.

Hal ini terlihat dari inflasi November yang mencapai 0,12% dan 11,68% secara year on year. Ini merupakan laju inflasi terendah dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya. Menurut dia, penurunan harga komoditas dan minyak mentah dunia telah mengurangi tekanan inflasi dalam negeri.

Ke depan, pihaknya tetap meyakini penurunan inflasi akan berlanjut pada 2009. "Penurunan tekanan inflasi diperkirakan akan berlanjut pada 2009 sehingga akan dapat mencapai kisaran sasaran 6,5–7,5%," katanya. Di sisi lain, Deputy Gubernur Bank Indonesia Hartadi A Sarwono mengatakan, pertumbuhan ekonomi pada 2009 bisa mencapai 5%.

"Pertumbuhan ekonomi di sekitar 5% sudah baik sekali," katanya. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi di dunia saat ini terus mengalami koreksi. Kondisi tersebut akan berimbas kepada Indonesia, terutama pada kinerja ekspor karena permintaan dunia akan menurun. Dia mengatakan, dunia saat ini memperkirakan Amerika Serikat (AS) akan mengalami resesi.

Apalagi bila kebijakan Presiden AS terpilih Barack Obama nantinya dianggap kurang kredibel sehingga tantangan perekonomian ke depan semakin sulit. Kondisi ini, kata Hartadi, juga berimbas pada China. Ekonomi negeri itu yang biasanya tumbuh di atas 9% juga diperkirakan mengalami perlambatan tahun depan. Pertumbuhan ekonomi negeri panda tersebut diperkirakan berada di kisaran 7–8%.

Dengan demikian, menurut dia, Indonesia juga terkena dampak penurunan pertumbuhan ekonomi dunia sebagai penyesuaian atas kondisi perekonomian tersebut. Agar perlambatan ekonomi tidak terlalu cepat, BI akan berusaha memperlancar aliran dana ke sektor riil agar tidak tersendat sehingga mampu menggerakkan perekonomian dalam negeri.

"Yang penting bagi kita, kecukupan likuiditas untuk kegiatan ekonomi jangan sampai macet. Macet itu artinya ada orang yang mampu melakukan kegiatan ekonomi dia nggak punya dana, apakah investasi baru atau working capital, itu jangan sampai berhenti," katanya. (Koran Sindo)

## **C. SOSBUD**

### **1. Budaya Potensial Sumbang Devisa**

Khazanah budaya di Indonesia memiliki potensi tinggi mendatangkan devisa bagi negara dan meningkatkan perekonomian rakyat.

Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni, dan Film (Dirjen NBSF) Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar) Tjetjep Suparman mengatakan, bangsa Indonesia sangat beruntung karena memiliki khazanah "deposit budaya" yang sangat kaya. Potensi budaya akan menjadi aset yang mendatangkan devisa dan bermanfaat bagi ekonomi rakyat jika diolah dan dikemas dengan baik.

Guna mencapai hal tersebut, salah satu upaya yang dilakukan Depbudpar adalah dengan menggelar Kongres Kebudayaan Indonesia ke-6 tahun 2008. Acara ini diselenggarakan di Bogor, Jawa Barat, 9–12 Desember. Menurut Tjetjep, tujuan kongres untuk menampung persepsi, aspirasi, partisipasi, minat serta perhatian masyarakat terhadap kebijakan publik mengenai budaya.

"Kita membuka kesempatan bagi tokoh masyarakat, budayawan, pakar budaya, seniman, ilmuwan, pemangku adat, serta pemerintah untuk berdialog menggali dan merumuskan upaya pelestarian budaya bangsa," ujarnya kepada SINDO di Gedung Depbudpar Jakarta kemarin. Kongres ini akan menghimpun masukan yang akan dipakai sebagai penyempurnaan konsep dan strategi dalam rangka memajukan kebudayaan nasional. Kebudayaan, kata dia, merupakan penjelmaan kebersamaan bangsa di Nusantara.

Kebinekaan budaya merupakan alat perekat persatuan bangsa Indonesia di wilayah NKRI. "Salah satu inti pembangunan kebudayaan adalah memperkokoh ketahanan budaya dan keutuhan nasional dari ancaman konflik horizontal atau vertikal yang dapat mengarah pada disintegrasi bangsa," ujarnya. Tjetjep mengungkapkan, Kongres Kebudayaan Indonesia 2008 diikuti sekitar 500 peserta dari kalangan budayawan, tokoh masyarakat, ilmuwan, akademisi, pemerintah, media massa, dan masyarakat umum.

Kongres menggelar sidang pleno dan 15 sidang kelompok yang terdiri atas topik kebijakan dan strategi kebudayaan, film/seni media, seni rupa, identitas budaya, warisan budaya, sastra, dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Tjetjep menuturkan, tema kongres tahun ini adalah "Kebudayaan untuk Kemajuan dan Perdamaian Menuju Kesejahteraan". Tema ini, menurut dia, diambil karena melihat keunggulan kebudayaan dewasa ini pada umumnya yang menyentuh langsung masyarakat.

Salah satu wujud nyata adalah ekonomi kreatif yang dari awal tujuan penciptaan serta pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat di sekelilingnya. "Contoh industri kreatif adalah berbagai perhelatan dan pertunjukan seni. Salah satu implementasinya adalah industri film yang sekarang sedang booming," tuturnya.

#### **Rekor Baru**

Sementara itu, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar) Jero Wacik mengatakan, penerimaan devisa dari sektor pariwisata pada 2008 mencapai USD7,5 miliar. "Ini suatu rekor nasional baru," kata Menbudpar se usai menyambut kedatangan Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao di Bandara Ngurah Rai, Bali, kemarin, untuk mengikuti Bali Forum Democracy.

Menbudpar menjelaskan, devisa tersebut didapat dari jumlah wisatawan mancanegara (wisman) 2008 yang diperkirakan 6,4–6,5 juta orang dengan tingkat pengeluaran sebesar USD1.178 per orang per kunjungan."Tahun ini kita menargetkan USD1.000 per wisman,tetapi hasil dari PES (passenger exit surveyoleh BPS) ternyata malah USD1.178 per wisman,"katanya. (Koran Sindo)

## **2. PERANTI LUNAK Pengurusan Piagam HKI Terus Meningkat**

Perusahaan yang berminat mengikuti program piagam hak kekayaan intelektual (HKI) mencapai 200 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 60 perusahaan sedang diproses untuk diaudit oleh auditor independen yang ditunjuk Business Software Alliance (BSA).

Menurut Perwakilan BSA Indonesia Donny A Sheyoputra, para perusahaan peminat program HKI berasal dari seluruh Indonesia. Hingga kini sudah lebih dari 60 perusahaan yang telah diaudit dan berhak mendapatkan Piagam HKI dari BSA. Para perusahaan yang sudah mendapat Piagam HKI tersebut, antara lain pabrik YKK Group, perusahaan transportasi Hiba Utama, jaringan hotel Mercure dan Accor serta perusahaan lainnya. "Sejak diluncurkan Agustus 2008, program Piagam HKI mendapat respons positif. Perusahaan yang berminat mendapat piagam ini sudah banyak dan terus bertambah," kata Donny dalam konferensi pers Sosialisasi Piagam HKI di Surabaya, Selasa (9/12).

Program Piagam HKI pertama kali diresmikan di Bandung pada Agustus 2008 lalu. Untuk sosialisasi program ini, BSA Indonesia melakukan kunjungan ke kota-kota besar di Indoensia, seperti Batam, Medan, dan Surabaya. Piagam HKI merupakan program audit khusus produk piranti lunak (software) yang dimiliki pengguna akhir, termasuk perusahaan. Program yang diusung BSA ini didukung penuh oleh Kepolisian Republik Indonesia. Bagi perusahaan yang dinyatakan lulus audit, maka akan mendapat Piagam HKI yang berlaku selama setahun.

Donny menjelaskan, terus meningkatnya proses Piagam HKI menandakan kesadaran para pengusaha terus bertambah. Sebab program ini mendukung kelangsungan usahanya secara jangka panjang. "Biaya memiliki Piagam HKI jauh lebih efisien daripada pengusaha yang bersangkutan ditindak polisi karena menggunakan piranti lunak bajakan," ucapnya.

Lebih jauh dia menuturkan, pada tahun depan, BSA Indonesia akan menambah dua anggota baru dari produsen software lokal. Sehingga total anggota lokal BSA Indonesia menjadi 5 perusahaan. Pada tahun ini, ada 3 perusahaan lokal anggota baru BSA, yakni PT Andal, Zahir International, dan Bamboomedia. "Pada 2009, kami menerima 2 anggota baru sehingga total ada 5 perusahaan anggota lokal. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan anggota lokal terbanyak di wilayah Asia Pasifik," tuturnya.(Suara Karya)

## **D. HANKAM**

:

### **1. Konga XXIIIB/UNIFIL Resmi Dibubarkan**

Kontingen Garuda XXIIIB/Unifil kembali ke Indonesia setelah bertugas lebih dari setahun. Pemulangan pasukan sejumlah 850 personel dan 11 orang staf ini dilaksanakan secara dua tahap, yaitu tahap pertama pada 19 dan 21 November dan tahap kedua pada 3 dan 5 Desember 2008 yang dipimpin oleh Komandan Satgas Letkol Inf AM Putranto.

Pada Rabu (10/12) Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso resmi menonaktifkan pasukan tersebut.

"Tidak ada yang lebih membahagiakan dan membanggakan bagi setiap panglima atau komandan, kecuali ketika menyambut dan menerima kembali pasukan dan prajuritnya dari medan tugas atau operasi," kata Panglima dalam amanatnya di depan pasukan di Cilangkap, Jakarta, Rabu.

Penugasan pasukan tersebut, menurut Panglima, merupakan implementasi dari Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701/2006 tertanggal 11 Agustus 2006. Selain itu, pengiriman pasukan perdamaian tersebut juga merupakan komitmen dan keikutsertaan dalam menjaga ketertiban dunia sesuai amanat konstitusi.

Dalam amanat tersebut, Panglima juga menitipkan pesan kepada pasukan untuk tetap bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka juga diminta untuk mempertahankan kepribadian, jati diri dan identitas.

Pasukan juga diperintahkan untuk berkonsolidasi serta menyelesaikan proses administratif serta inventarisasi sarana dan prasarana, termasuk material, personal dan persenjataan.

"Laksanakan evaluasi tentang pelaksanaan tugas itu dan dilaporkan hal-hal mana yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas itu. Kita jadikan bahan pertimbangan dalam menyiapkan dan menyupervisi dan menegksistensi pelaksanaan tugas hingga pelaksanaan lebih baik lagi," imbuhnya.(Media Indonesia)

## **E. HUKUM**

### **1. RI-Australia Barter Buron, Adrian Ditukar Hadi Asmadi**

Pemerintah Australia tengah memproses ekstradisi tersangka kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Adrian Adam. Kepastian mengirim kembali koruptor ke Indonesia itu diungkapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setelah bertemu Perdana Menteri Australia, Kevin Rudd, di Nusa Dua, Bali, Rabu (10/12). "Kita berharap segera terwujud sehingga proses hukum tersangka bisa dilakukan," ujar Presiden Yudhoyono.

Menurut Yudhoyono, keputusan mengekstradisi Adrian bagian dari kerja sama dan sejumlah kesepakatan dalam bidang hukum antara kedua negara. Indonesia, kata Presiden, bersedia melakukan ekstradisi terhadap Hadi Asmadi ke negeri kangguru sebagai imbal balik Adrian.

Hadi adalah warga Iran yang terlibat dalam penyelundupan manusia dari Indonesia ke Australia. "Pengadilan sudah setuju untuk melakukan ekstradisi itu (Hadi Asmadi)," beber Presiden.

Presiden juga mengatakan, kedua negara akan terus bekerja sama untuk mengatasi penyelundupan manusia. Kepada Rudd, Yudhoyono berceritera, saat ini parlemen Indonesia sedang memproses ratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa.

Konvensi itu tentang Trans National Crime yang mencakup pencegahan terhadap penyelundupan dan perdagangan manusia. Ratifikasi akan menjadi dasar yang kokoh mengatasi kejahatan penyelundupan manusia antarnegara.

Rudd menegaskan, penyelundupan manusia adalah masalah yang sangat serius bagi Australia. Pemerintahannya berharap kerja sama yang lebih intensif dalam pencegahan dan penanganannya. "Kejahatan ini merupakan kejahatan transnasional dan sudah menjadi agenda global," ujarnya. Dia sangat gembira mendapat informasi bahwa Indonesia akan segera meratifikasi konvensi PBB mengenai kejahatan itu.(Tempo Interaktif)

**F. OLAH RAGA** : **Tidak Ada**

**G. LINGKUNGAN HIDUP** :

### **1. Busway dan Bantar Gebang Untuk Perdagangan Karbon**

Pemprov DKI Jakarta mengkaji kemungkinan busway dan tempat pengolahan akhir (TPA) Bantar Gebang dimasukkan dalam perdagangan karbon dengan negara maju karena kedua sistem tersebut terbukti mengurangi polusi udara.

"Kita sudah memproses `carbon credit` untuk Bantar Gebang tentang pengolahan limbah dan busway, yang menggunakan BBG. Bantar Gebang sedang disiapkan dokumen sementara busway masih dalam kajian," ujar Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo di Balaikota Jakarta, Selasa.

Ide mengusulkan busway Transjakarta yang menggunakan Bahan Bakar Gas (BBG) sebagai salah satu komoditas perdagangan karbon itu didapat dari moda transportasi serupa yang dipraktekkan di Bogota, Kolombia.

"Bogota sudah dapat untuk buswaynya, sekarang giliran Jakarta," kata Gubernur.

Namun Gubernur menyebut perdagangan karbon itu bukan hal yang mudah karena yang melakukan penilaian bukan Pemerintah, melainkan konsultan independen.

Menurut Fauzi, selain kedua hal itu, pihaknya sedang mengkaji kemungkinan penghematan energi yang diwujudkan dengan konversi minyak tanah ke elpiji juga dimasukkan dalam perdagangan karbon dengan negara maju.

"Pengajuan penghematan energi dengan elpiji juga bisa diajukan, tapi saya belum tahu persisnya," ujarnya.

Perdagangan karbon dunia dilakukan berdasarkan Protokol Kyoto dimana negara-negara di dunia sepakat untuk menekan emisi karbon dioksida rata-rata 5,2 persen selama 2008 hingga 2012.

Di bawah kesepakatan Protokol Kyoto, negara industri maju penghasil emisi karbon dioksida diwajibkan membayar kompensasi kepada negara miskin dan atau berkembang atas oksigen yang dihasilkannya.(Kompas)

### III. ARTIKEL

:

#### 1. **ASEAN human rights body: Will it have an impact on Myanmar's junta? (by Djoko Susilo)**

Almost a year ago, at a meeting of parliamentarians of the Association of Southeast Asian Nations, I urged the ASEAN states to freeze Myanmar's membership from the 10-member grouping since there had been no serious political will to implement democracy and protect human rights, such as by releasing its jailed political opponents -- especially Daw Aung San Suu Kyi from her house detention.

Last year's incidents in Myanmar proved that such a call is indeed still valid and it will still be valid until the domestic situation in that country moves toward democracy.

The violent crackdown and the junta's brutality against the peaceful demonstrations of the Buddhist monks -- who were supported by the Myanmarese people -- were well documented and widely known throughout the international community, yet the junta recently tried to fool the world by announcing a so-called general election.

Regrettably some ASEAN leaders have expressed their readiness to cooperate with the junta and welcomed the last false referendum and the planned election as "real" progress. It is a shameful act and betrays the people of Burma/Myanmar. They don't really care about the sufferings of the people who have been oppressed by the military junta for almost two decades.

Indeed, we cannot just sit back and wait until the situation improves. Action must be taken because there has been no serious will from the military junta to work for a peaceful solution to Myanmar's problems.

With this appeal, the international community needs to work together and have a united stand to put more pressure on Myanmar. The Indonesian government, in this case, supports the efforts of democratization and reconciliation. In his meeting with UN special envoy Ibrahim Gambari, President Susilo Bambang Yudhoyono said it was necessary to push for Myanmar's reconciliation process from many aspects.

However, the Indonesian government believes that those aspects that must be advocated in Myanmar are not only related to democracy and human rights, but also to security and stability as potential threats to Myanmar's disintegration. This is the way to handle Myanmar's psychological issues, especially with the sense of insecurity and inconvenience of the ruling government in the context of the new Myanmar.

The Indonesian government also strongly supports Gambari's mission to solve Myanmar's problems within UN's framework and Indonesia will ensure that the issue remains on the UN Security Council's agenda.

In addition, Indonesia urges the Chinese and Indian governments to do more to convince Myanmar to improve its dismal human rights record. We believe it is important to enlist the help of these two nations to convince the junta to fulfill its promise to embrace democracy.

Within the ASEAN context, especially in its relations between the Myanmar issue and the signing of the ASEAN Charter in Singapore last year or its finalization later this year (probably) in Thailand, many have expressed concerns as to whether the charter will work as expected, especially after the recent troubles in that member country. The Indonesian parliament, for example, has expressed its concern over several of the ASEAN Charter's articles -- a legally binding treaty that regulates relations among the 10 members of ASEAN.

Recent reports of senior officials meeting in Denpasar, Bali, in preparation for the upcoming ASEAN summit produced discouraging news. The members of the high-level panel have yet to agree on the official name of the human rights body. Some reports suggest that many countries in ASEAN are more interested in the "promotion" rather than the "protection" of human rights.

Sihesak Phuangketkeow, a senior Thai diplomat who chaired the meeting said that human rights promotion and protection would be an evolutionary process given the differences of the ASEAN members, in terms of their diversities, stages of development and political awareness.

Thus, member countries do not expect too much on the protection of human rights from within ASEAN, let alone its ability to maintain peace and security in the region. Myanmar will be the biggest offender, and the crimes committed by the junta will go unpunished.

Indonesia acknowledges that ASEAN's diplomatic efforts to prod Myanmar to rapidly democratize have failed. ASEAN has recognized that its constructive engagement has not produced any tangible results. But sanctions and pressures by western countries have also failed.

Within the ASEAN Parliamentary, the Myanmar tragedy is a catastrophe for the region. The Parliamentarians urge their governments to take strong actions and recognize the seriousness of the human security problems caused by the Myanmar regime. We must be as one to end the misery and sufferings of the Myanmar people. (The Jakarta Post)

**IV. LAIN-LAIN : T i d a k**

**Ada**

**V. EDITORIAL :**

### **1. Hari Antikorupsi Sedunia**

Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia pada 9 Desember berlangsung di sejumlah kota. Sejumlah kalangan memanfaatkan momentum ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengimbau penyelenggara negara untuk tidak melakukan korupsi dengan segala derivasinya. KPK juga menyerukan masyarakat untuk tidak berkolusi dengan penyelenggara negara untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Partai Demokrat memasang iklan di sejumlah media untuk menyatakan "tidak" terhadap korupsi! Berbagai model, berbagai upaya, dilakukan untuk menghentikan korupsi di negeri ini. Sekolah kejujuran diintroduksi di sejumlah sekolah untuk menanamkan nilai kejujuran. Kemarin, berbagai kelompok masyarakat turun ke jalan. Ada yang membagikan stiker antikorupsi, bunga antikorupsi. Dalam praktiknya, penindakan terhadap tersangka korupsi masih dilaksanakan, tetapi kita tetap bertanya mengapa korupsi terus dan tetap saja terjadi.

Tanggal 9 Desember diambil sebagai Hari Antikorupsi berbarengan dengan ditandatanganinya Konvensi Antikorupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Convention Against Corruption, UNCAC) di Merida, Meksiko, 9-11 Desember 2003. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi itu pada 18 April 2006 dengan UU Nomor 7 Tahun 2006.

Peringatan Hari Antikorupsi kali ini sebenarnya mendapatkan momentum penting karena berbarengan dengan peringatan 60 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disepakati Majelis Umum PBB 10 Desember 1948. Deklarasi tersebut bukan hanya mengatur mengenai hak sipil dan politik, tetapi juga hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Gerakan sosial masyarakat untuk memberantas korupsi sangat terkait dengan upaya pemerintah memenuhi hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kemiskinan yang terjadi di Tanah Air, hilangnya akses pendidikan kaum miskin, busung lapar yang terjadi di sejumlah daerah juga disebabkan praktik korupsi yang terus saja terjadi. Jika angka korupsi bisa ditekan, anggaran pemerintah itu bisa digunakan untuk memenuhi hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.

Konvensi Antikorupsi lahir dari sebuah keprihatinan bangsa-bangsa atas ancaman serius yang ditimbulkan oleh korupsi. Korupsi telah mengancam stabilitas, keamanan masyarakat yang merusak lembaga dan nilai demokrasi, nilai etika, dan keadilan, serta mengacaukan pembangunan berkelanjutan. Oleh konvensi itu, korupsi telah ditempatkan sebagai musuh bangsa-bangsa!

Kita mendukung peringatan Hari Antikorupsi 2009 sebagai titik awal gerakan sosial. Pemberantasan korupsi tak mungkin hanya diserahkan kepada otoritas negara. Lembaga internasional, korporasi internasional, kelompok masyarakat harus ikut mempunyai komitmen yang sama. Peringatan Hari Antikorupsi hendaknya tidak sekadar seremoni, tetapi mewujudkan menjadi kesadaran kolektif bangsa untuk tidak melakukan korupsi!

### **2. Human rights abuser**

The 71-year-old former Finnish president Martti Ahtisaari receives the Nobel Peace Prize in Oslo today for his tireless efforts to end conflicts in many parts of the world, including in our once

restive province of Aceh. While the world commemorates the International Human Rights Day on Wednesday, it is tempting to raise a question about the background of Ahtisaari's prize-winning story.

Aceh's prolonged war eventually ended in August 2005. Was this peace attributed to Ahtisaari's genius as a peace broker, or more because of the Dec. 2004 tsunami that severely damaged the province and brought both the government and the Aceh rebels to the same table for reconciliation and eventually a peace agreement?

While millions of Indonesians are very proud of Barack Obama's landslide victory in the U.S. presidential election last month due to his childhood years in a Jakarta neighborhood, do we Indonesians share the same pride in Ahtisaari's achievement of a Nobel Peace Prize?

We do appreciate the former Finnish president for his success in mediating peace talks between the Indonesian government and the Free Aceh Movement (GAM) to end the war which had claimed hundreds of thousands of lives during the nearly three decades of war. Vice President Jusuf Kalla and GAM leaders also deserve our praise. However, without the tsunami disaster that hit the province on Dec. 26, 2004, which severely weakened the two warring parties, perhaps the road to peace in Aceh would have been much more difficult to travel.

Ahtisaari's Nobel win is actually an embarrassment for Indonesia, because the peace accord in Aceh is indeed his greatest peace achievement. If the military had not committed gross human rights violations and the central government had not robbed the Acehnese of their rights -- including their rich natural resources -- perhaps Ahtisaari's chances of winning would have been smaller.

This is not the first time Indonesia has been a key subject of a Nobel Peace Prize winner. In 1996 when East Timor was still a province of Indonesia, East Timorese Bishop Carlos Felipe Ximenes Belo and Jose Ramos-Horta -- the incumbent Timor Leste President -- won it for their struggles in stopping Indonesian ferocities in East Timor. Three years later, those for independence won a referendum.

We can easily point fingers at the late Soeharto and his generals for the repugnant human rights violations in Aceh, East Timor and in other places in this country. But if we are honest with ourselves, we have to acknowledge that while our nation now has a stronger commitment to human rights protection and there have been fewer abuses since Soeharto's fall in 1998, as a nation we tend to cover up our past crimes.

The House of Representatives (DPR) has suddenly shown an interest in reopening the dark cases of violence, murders and kidnappings which occurred before and after Soeharto fell.

After ignoring military brutalities for years, political parties act as if they have now "repented" and want to find those who were responsible for these crimes. Many people suspect the legislators' sudden behavioral change is merely motivated by the wish to bluff their rivals in next year's legislative and presidential elections.

Many Indonesian Muslims tended to show little sympathy for the sufferings of the devout Muslims in seditious Aceh during the war because -- for many of us -- the existence of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) was to be preserved at all costs.

No single country in this world -- Indonesia is no exception -- is free from the problems of human rights. And as the world's third largest democracy in the world after India and the United States, our nation's track record in human rights protection is expected to improve a lot. We need to remember, however, that democracy does not only mean listening to the voices of the majority, but to all segments of society, no matter how few in number a segment may be.

We wish to congratulate the former Finnish president for winning the prestigious prize. However, we do hope that there will be no more future Nobel Peace Prize winners because of his/her achievements in ending human rights abuses in this country. (The Jakarta Post)

**Jakarta, 10 Desember 2008**  
**Sub Direktorat Berita**  
**Direktorat Informasi dan Media**  
**D e p l u**